

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA)

Jeivi Prisilia Seroy, Arie F. Kawulur, Royke I. J. Pangkey

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail : prisiliaseroy@gmail.com, ariekawulur@unima.ac.id, irpangkey@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak Kemandirian Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi dan sampel yang terdiri dari 35 responden, yaitu pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, penyebaran angket, dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan nilai tabel F pada tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai Ftabel sebesar 3.285. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kemandirian Daerah (X1) dan Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal (Y) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Kata kunci: Kemandirian Daerah, Jumlah Penduduk, Belanja Modal

Abstract: The aim of this research is to investigate the impact of Regional Autonomy and Population Size on Capital Expenditure at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in Minahasa Regency, North Sulawesi Province. This study employs a quantitative method with a population and sample comprising 35 respondents, who are employees of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in Minahasa Regency, North Sulawesi Province. Data are collected through observation, distribution of questionnaires, and documentation techniques, and data analysis is conducted using multiple regression analysis. The research findings indicate that based on the F-table value at a significance level of 0.05, the obtained F-table value is 3.285. The analysis results demonstrate that both the Regional Autonomy variable (X1) and the Population Size variable (X2) have a simultaneous impact on Capital Expenditure (Y) at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in Minahasa Regency, North Sulawesi Province.

Keywords: Regional Independence, Total Population, Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Belanja modal adalah pengeluaran yang menghasilkan penciptaan aset baru dan dilakukan dengan tujuan mempromosikan ekspansi ekonomi dan pembangunan di wilayah tertentu. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan wilayahnya dengan menetapkan anggaran untuk belanja modal yang tepat sasaran. Hal ini membuka jalan bagi masyarakat untuk nantinya merasakan dampak dari belanja modal yang telah dilakukan, yang merupakan kontribusi penting bagi pertumbuhan daerah. Memilih berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk peningkatan modal merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa layanan publik disampaikan secara efektif dan memenuhi persetujuan luas. Istilah "belanja modal produktif" mengacu pada setiap pengeluaran modal yang dilakukan dengan tujuan melayani kepentingan umum. Ini mungkin termasuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas pemeliharaan yang meningkatkan masa manfaat aset atau meningkatkan kinerja aset tersebut.

Penguatan administrasi lokal merupakan salah satu tujuan utama pembangunan daerah. Hal ini memungkinkan kotamadya untuk menyediakan warganya dengan tingkat layanan yang

lebih tinggi. Sangat penting untuk keberhasilan ekspansi bahwa fasilitas dan infrastruktur yang ada di kawasan ini diperluas untuk mengakomodasi pembangunan. Jika perencanaan tersebut masuk ke dalam kategori belanja APBD, terutama kategori belanja untuk belanja modal, maka pembangunan fisik dapat dilakukan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Hal ini dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Permendagri No. 52 Tahun 2015, dan kemudian disahkan oleh pemerintah daerah.

Aspek penting dari apa yang dikenal sebagai "kemerdekaan daerah" adalah tidak adanya keterlibatan dari pemerintah federal dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah negara bagian dan lokal tentang alokasi dana untuk tujuan peningkatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Melalui administrasi pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan aset daerah, pemerintah pusat memainkan peran penting dalam proses mendorong pengembangan otonomi daerah. Laut serta Handayani (2020).

Daerah telah diberi otonomi lebih dalam pengelolaan urusan dalam negeri. Dengan memfasilitasi dan mengatur penggunaan uang dari APBD, otoritas berharap dapat mencapai misinya untuk mendorong persaingan yang sehat antar daerah, mendorong inovasi, dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini akan dilakukan dengan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat (APBD). Telah ditunjukkan bahwa besaran otonomi ekonomi yang dimiliki suatu daerah dapat dievaluasi dengan melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut. Jika PAD mampu mengumpulkan lebih banyak uang daripada yang bersedia disediakan oleh pemerintah pusat, maka daerah tersebut dapat dianggap mandiri. Indeks PAD digunakan sebagai stand-in untuk otonomi ekonomi di daerah tertentu. Akibatnya, penting untuk membedakan PAD yang dimaksudkan dengan PAD yang sebenarnya untuk menilai efektivitasnya. Jika fondasinya kuat, maka kemungkinan daerah tersebut memiliki kapasitas sumber daya keuangan yang signifikan. Namun demikian, pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di samping uang lainnya, diharuskan hanya berfungsi sebagai cara mendukung aktualisasi pembangunan pemerintah dan daerah. Ada kemungkinan bahwa suatu daerah akan tumbuh untuk dilihat sebagai swasembada semakin besar tingkat di mana keuangan daerah terdesentralisasi. Mereka yang menulis buku (Lestari, Dali, dan Abdullah)

Meskipun demikian, definisi kebijakan dan penerapan konsep otonomi daerah sebagai kebebasan dan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengeksplorasi potensi daerahnya telah menyebabkan kesenjangan dalam pengembangan wilayah regional, dengan daerah yang lebih maju cenderung menjadi daerah yang sudah relatif kaya dan terorganisir dengan baik. Hal ini dikarenakan definisi kebijakan yang ambigu dan penerapan konsep otonomi daerah sebagai kebebasan dan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengeksplorasi potensi daerahnya. Kalaupun belum dijamin, industri yang seimbang akan maju lebih pesat daripada industri yang kurang potensial. Ini adalah harapannya. Hal ini telah ditunjukkan melalui penelitian sebagai kasus (Zulkarnain, Astuti, & Wiriani, 2019).

Ukuran populasi di kawasan ini memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan pengeluaran. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Uraian dan Analisis APBD 2011, rasio belanja modal terhadap penduduk merupakan indikator lain dari pola belanja daerah. Ini mengungkapkan apakah suatu daerah memprioritaskan pengeluaran untuk barang-barang yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan, seperti belanja modal. Rasio ini dapat ditemukan dengan membagi jumlah total belanja modal dengan total populasi.

Pada tahun 2007, Badan Keuangan dan Kantor Manajemen Aset Keuangan dan Pendapatan keduanya didirikan. Sebelumnya, Kantor Pengelolaan Aset Keuangan dan Penerimaan dikenal sebagai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Untuk membedakannya dengan kantor pendapatan daerah lainnya, namanya diubah menjadi DIPENDA (Kantor Pendapatan Daerah) pada tahun 2015. Dua tahun kemudian, pada 2017, namanya diubah menjadi Badan Penanggulangan Pajak dan Retribusi Daerah. Akhirnya pada tahun 2021 berganti nama dan direstrukturisasi menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

Sebagai hasil dari BAPENDA, setiap daerah mampu mempertahankan independensi moneterinya. Pendapatan dari otonomi daerah dapat diinvestasikan kembali di daerah tersebut atau didistribusikan kembali kepada orang-orang yang tinggal di sana, tergantung pada opsi mana yang dipilih.

Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak menyadari bahwa tingkat otonomi daerah secara langsung berkorelasi dengan jumlah uang yang ada di lokasi itu. Situasi di mana hasil dari bisnis lokal dimasukkan kembali ke masyarakat untuk membiayai peningkatan fasilitas fisik yang digunakan penduduk masyarakat. Sangat penting bagi pemekaran Kabupaten Minahasa di masa depan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan diversifikasi basis ekonomi daerah; Uang yang telah disumbangkan akan membantu mewujudkan tujuan ini.

Pendapatan yang dihasilkan oleh sektor publik sangat penting untuk kelangsungan dan keberhasilan sejumlah program pembangunan publik dan layanan publik yang berbeda. Karena itu, komposisi pendapatan negara dan daerah sangat tergantung pada tingkat otonomi yang dinikmati oleh berbagai daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang dibedakan dengan konsentrasinya pada data numerik serta investigasi korelasi dan hubungan kausal antara sejumlah variabel yang berbeda (Sugiyono, 2012). Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber daya yang tersedia untuk umum, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Minahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan di suatu daerah merupakan indikator yang baik dari tingkat otonomi yang dimiliki daerah tersebut. Jika PAD mampu mengumpulkan lebih banyak uang daripada yang bersedia disediakan oleh pemerintah pusat, maka daerah tersebut dapat dianggap mandiri. Indeks PAD digunakan sebagai stand-in untuk otonomi ekonomi di daerah tertentu. Akibatnya, penting untuk membedakan PAD yang dimaksudkan dengan PAD yang sebenarnya untuk menilai efektivitasnya. Jika fondasinya kuat, maka kemungkinan daerah tersebut memiliki kapasitas sumber daya keuangan yang signifikan. Namun demikian, pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di samping uang lainnya, diharuskan hanya berfungsi sebagai cara mendukung aktualisasi pembangunan pemerintah dan daerah.

Ada kemungkinan bahwa suatu daerah akan tumbuh untuk dilihat sebagai swasembada semakin besar tingkat di mana keuangan daerah terdesentralisasi. Mereka yang menulis buku (Lestari, Dali, dan Abdullah)

Belanja modal adalah pengeluaran yang menghasilkan penciptaan aset baru dan dilakukan dengan tujuan mempromosikan ekspansi ekonomi dan pembangunan di wilayah tertentu. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan wilayahnya dengan menetapkan anggaran untuk belanja modal yang tepat sasaran. Hal ini membuka jalan bagi masyarakat untuk nantinya merasakan dampak dari belanja modal yang telah dilakukan, yang merupakan kontribusi penting bagi pertumbuhan daerah. Memilih berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk peningkatan modal merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa layanan publik disampaikan secara efektif dan memenuhi persetujuan luas. Contoh belanja modal produktif termasuk investasi yang dilakukan dalam infrastruktur publik dan fasilitas pemeliharaan dengan tujuan memperpanjang masa manfaat aset, meningkatkan fungsinya, dan meningkatkan kualitasnya.

Temuan percobaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menguji hipotesis bahwa otonomi daerah dan kependudukan memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap belanja modal. Rumus berikut digunakan untuk menentukan nilai Ttable: di mana adalah nilai koefisien alfa, n adalah jumlah sampel, dan K adalah jumlah variabel yang dianggap independen (X): $(\alpha / 2; n - K - 1) = (0,05 / 2; 35 - 2 - 1 = (0,025; 32)$, di mana α mewakili nilai alfa, n mewakili jumlah sampel, dan K mewakili jumlah area belanja modal. Setelah itu, harga Ttabel dibandingkan dengan nilai proyeksi, dan dari sana, orang dapat menarik kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yang terletak di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sedikit terpengaruh oleh harga ini.

Penelitian kami menegaskan kesimpulan yang dicapai oleh Galang Samudra dan Nur Handayani dalam studi mereka berjudul "Dampak Kedaulatan, Pertumbuhan PDB, dan Kependudukan terhadap Belanja Modal Daerah pada tahun 2020," yang menemukan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Studi yang dilakukan di kota dan kabupaten Gerbangkertasila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Lamongan) di Jawa Timur dengan topik pengaruh otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kependudukan terhadap belanja modal pada tahun 2013 hingga 2018 telah menghasilkan sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik, antara lain sebagai berikut: Ada hubungan positif antara otonomi daerah dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk investasi (1). Jumlah orang di suatu negara memiliki dampak yang menguntungkan pada jumlah yang dihabiskan untuk barang modal (2).

Temuan dan pembahasan kajian ini tentang pengaruh otonomi daerah terhadap belanja modal BAPENDA di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal BAPENDA. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyelidiki hubungan antara otonomi daerah dengan belanja modal BAPENDA (BAPENDA).

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Saat membuat rencana pembangunan, pemerintah kota dapat melihat konstituen mereka sebagai sumber daya yang berguna untuk pertumbuhan di masa depan dan beban keuangan tambahan. Ini karena konstituen adalah sumber daya berharga untuk pertumbuhan

di masa depan. Ketika ada lebih banyak orang yang tinggal di suatu wilayah, perusahaan dapat melihat peningkatan produksi, serta akses ke pasokan tenaga kerja, pengusaha berbakat, dan kepemimpinan perusahaan. Ketika populasi suatu wilayah tumbuh, demikian juga kompleksitas kebutuhannya; Namun, ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, kegiatan ekonomi di daerah berkembang meningkat, dan penduduk dapat berkontribusi untuk meningkatkan anggaran belanja modal, sehingga meningkatkan wilayah tersebut. Anggaran belanja modal pemerintah daerah harus digunakan untuk mendukung dan memberi manfaat bagi penduduk. Ketika populasi suatu wilayah tumbuh, demikian juga kompleksitas kebutuhannya. Studi menunjukkan bahwa ada korelasi yang dapat dianggap positif dan cukup besar antara populasi dan investasi (Sari & Ningsih, 2018)

Ukuran populasi di kawasan ini memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan pengeluaran. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Uraian dan Analisis APBD 2011, rasio belanja modal terhadap penduduk merupakan indikator lain dari pola belanja daerah. Ini mengungkapkan apakah suatu daerah memprioritaskan pengeluaran untuk barang-barang yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, seperti belanja modal. Rasio ini dapat ditemukan dengan membagi jumlah total belanja modal dengan total populasi.

Pemeriksaan hipotesis tentang hubungan antara kependudukan dan pengeluaran untuk proyek modal di Kabupaten Minahasa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara. Untuk membantu menjawab hipotesis pertama, penelitian ini menyelidiki apakah ukuran populasi memiliki pengaruh substansial dan menguntungkan terhadap jumlah uang yang dihabiskan untuk investasi modal. Nilai hitung dibandingkan dengan biaya T_{tabel} , yang merupakan variabel Jumlah Penduduk $X^2 = 2,014 > 1,694$, memanfaatkan tabel T 0,05 dan df 32 untuk menghasilkan $T_{tabel} = 1,694$. Tabel T digunakan untuk menghitung nilai T, dan metode untuk menghitung T adalah sebagai berikut: di mana α = adalah nilai alfa, n = adalah jumlah sampel, dan K = adalah jumlah variabel independen (X) (0, 025; 32). Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mencapai kesimpulan bahwa Belanja Modal Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sangat terpengaruh.

Penelitian ini sesuai dengan Pertama Sari dan Nurul Hutami Ningsih (2018), yang melihat pengaruh ekspansi penduduk terhadap belanja modal. Dalam penelitian mereka, penulis melihat bagaimana pertumbuhan penduduk mempengaruhi investasi modal. Berdasarkan hasil mereka, kami dapat menarik kesimpulan berikut mengenai pengaruh ukuran populasi pada distribusi dana untuk belanja modal di berbagai kabupaten dan kota yang membentuk provinsi Sumatera Selatan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa populasi memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan secara statistik terhadap investasi. Kesimpulan ini dicapai sebagai konsekuensi langsung dari temuan bagian sebelumnya.

Temuan dan pembahasan dampak kependudukan terhadap belanja modal di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, mengarah pada kesimpulan bahwa kependudukan dan belanja modal di Badan Pendapatan Daerah berkorelasi signifikan satu sama lain. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan dan pembahasan dampak kependudukan terhadap belanja modal di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pengaruh Kemandirian Daerah Dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Aspek penting dari apa yang dikenal sebagai "kemerdekaan daerah" adalah tidak adanya keterlibatan dari pemerintah federal dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah negara bagian dan lokal tentang alokasi dana untuk tujuan peningkatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Melalui administrasi pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan aset daerah, pemerintah pusat memainkan peran penting dalam proses mendorong pengembangan otonomi daerah. Laut serta Handayani (2020).

Daerah telah diberi otonomi lebih dalam pengelolaan urusan dalam negeri. Dengan memfasilitasi dan mengatur penggunaan uang dari APBD, otoritas berharap dapat mencapai misinya untuk mendorong persaingan yang sehat antar daerah, mendorong inovasi, dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini akan dilakukan dengan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat (APBD). Telah ditunjukkan bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Selain itu, seperti yang dipersyaratkan oleh Peraturan Daerah, menyatakan bahwa APBD disiapkan untuk implementasi pemerintah di daerah berkembang dan menghasilkan pendapatan daerah sebanyak mungkin. Ketika menentukan berapa banyak uang yang harus dialokasikan untuk proyek-proyek bangunan besar, pemerintah memiliki tugas untuk mempertimbangkan tidak hanya jumlah uang yang diperoleh di daerah tersebut, tetapi juga kebutuhan yang harus dipenuhi di sana. Jika pemerintah serius meningkatkan investasi modal, pemerintah juga harus melakukan segala daya untuk meningkatkan ekonomi lokal sehingga dapat menciptakan lebih banyak uang. Hanya dengan begitu pemerintah dapat memenuhi tujuannya untuk menumbuhkan investasi modal.

Menurut variabel, tampaknya ada hubungan positif antara otonomi daerah dan investasi tetap. Studi dari menunjukkan bahwa Pengaruh Langsung yang menguntungkan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas terhadap Belanja Modal ada, dan efek ini didukung oleh penelitian. Hal ini menandakan bahwa pemerintah, untuk memaksimalkan belanja modal, harus memberikan kreativitas dan keterampilan kepada masyarakat, serta memperkuat kapasitas masyarakat, sehingga pendapatan asli daerah meningkat. Untuk melakukan ini, pemerintah harus memperkuat kapasitas masyarakat (Ocean & Handayani, 2020) Hal ini telah ditunjukkan melalui penelitian untuk menjadi kasus (Zulkarnain, Astuti, & Wiriani, 2019).

Sebuah percobaan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara untuk menguji premis bahwa otonomi daerah dan ukuran penduduk berpengaruh pada jumlah uang yang dikeluarkan untuk belanja modal. Investigasi ini dilakukan dengan maksud untuk menguji hipotesis ketiga. Hasil ini dapat dibandingkan dengan Nilai F tabel menggunakan rumus: Uji F menghasilkan nilai 3,581, yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan cukup besar antara otonomi daerah dan kependudukan pada belanja modal. Rumus untuk tabel F adalah: $(K; n-K)$. K sama dengan jumlah total konstanta (bebas) Silakan merujuk ke "n" untuk ukuran sampel. Ketika Anda memasukkan $(2; 35 - 2)$ ke dalam persamaan untuk Ftabel, Anda mendapatkan hasilnya $(2; 33)$ Ketika kita membandingkan nilai Fcalculate dengan harga Ftabel, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Kemandirian Daerah dan Ukuran Penduduk keduanya memiliki pengaruh

terhadap Belanja Modal di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Minahasa, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara.

Temuan dan pembahasan kajian berjudul Pengaruh Kemandirian Daerah dan Kependudukan terhadap Belanja Modal Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa kemandirian daerah dan kependudukan berdampak signifikan terhadap jumlah total uang yang dikeluarkan untuk peningkatan modal oleh BAPENDA (BAPENDA). Mengingat bahwa pemerintah sekarang melihat penduduknya sebagai aset daerah dan permintaan modal yang tinggi untuk pertumbuhan dan pembangunan, ini memiliki implikasi untuk metode dimana perencanaan pembangunan dilakukan. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara merupakan roda penggerak penting dalam roda perekonomian. Ini karena mereka menyediakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yang bertanggung jawab untuk memperluas operasi bisnis, dengan tenaga kerja dan pemilik bisnis terampil yang dibutuhkan untuk mengembangkan operasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengaruh kemandirian daerah dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah mengungkap temuan yang penting. Pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemandirian daerah terhadap belanja modal di BAPENDA Kabupaten Minahasa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangannya, semakin besar kemungkinan mereka akan mengalokasikan dana untuk belanja modal yang meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik.

Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di BAPENDA Kabupaten Minahasa. Artinya, semakin banyak penduduk di daerah tersebut, semakin besar kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Hal ini mendorong BAPENDA untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk belanja modal guna memenuhi tuntutan populasi yang berkembang.

Selain itu, penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa kemandirian daerah dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di BAPENDA Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kombinasi kedua faktor ini memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan belanja modal di daerah tersebut.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menambahkan variabel lain selain kemandirian daerah dan jumlah penduduk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi belanja modal di BAPENDA Kabupaten Minahasa. Ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih holistik.

Terakhir, bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana belanja modal. Dengan memahami pengaruh kemandirian daerah dan jumlah penduduk, BAPENDA dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali) . Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 11 No. 1, halaman: 68-79, Januari 2010.
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap. Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper.
- Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 1, Seri D, Februari 2020.
- Biri', s., kewo, c. L., & sumlok, c. (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up (Studi Kasus Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja). Jaim: Jurnal Akuntansi Manado.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat). Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 02, December 2020.
- Holung, R. L., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. Jurnal EMBA, 869-877.
- Indiyanti, N. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 9, 2018.
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 44-55.
- Lestari, D. P., & Hariani, S. (2020). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, 77-84.
- Luwunaung, c., tawas, y., & kambey, j. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua 2015-2019. Jaim: Jurnal Akuntansi Manado.
- Permatasari, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi).
- Renyaan, a. C., & kawulur, h. (2022). Analisis Persepsi Pegawai Tentang Penerapan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara Pada Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tual). Jaim: Jurnal Akuntansi Manado.
- Sampow, R. R., & Pangkey, R.I.J. (2022). Analisa Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. Jaim: Jurnal Akuntansi Manado.
- Samudra, G., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1-20.



- Sari, P., & Ningsih, N. H. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAU, dan DAK sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 99-112.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, M. T., & Santoso, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel . *Majalah Inspiratif*, Volume 7 Nomor 13, Juli 2021.
- Wongkar, d. L., senduk, v. A., & tanor, I. A. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di Kabupaten Minahasa. *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado*.
- Yulihantini, D. T., Sukarno, H., & Wardayati, S. M. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 12, No. 1 Januari 2018, Hal. 37 - 50.
- Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 65-73.